RISALAH

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2018

TENTANG

MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT
KE- 73 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 DAN
PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2019
BESERTA NOTA KEUANGANNYA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 73 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 DAN PENGANTAR / KETERANGAN ATAS RAPBN TAHUN 2019 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

Hari : KAMIS
Tanggal : 16 AGUSTUS 2018
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT**:

1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan HUT ke- 73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018;
3. Skors;
4. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangannya;
5. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **H. GUNASIH, S.E.**
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **Drs. DRUPODO, M.Si.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. **JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 44 orang

VII. **ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 28 orang

VIII. **ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa	: 2 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 3 orang
5. Fraksi Gerindra : 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : - orang
7. Fraksi Harapan : 2 orang

Jumlah : 16 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , atas anugerah yang diberikan kepada kita berupa kesehatan jasmani dan rokhani sehingga pada hari ini Kamis tanggal 16 Agustus 2018 kita berkesempatan mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan agenda pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Ke-73

Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dukumen Pendukungnya. Rapat paripurna ini dilaksanakan atas dasar hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 4 Agustus 2018, serta berpedoman pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-604 / M.Sesneg / Set / TU.00.04 / 08 / 2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan RI Tahun 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pada hari Jum'at tepatnya tanggal 17 Agustus 2018 esok pagi, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan yang ke-73. Hari yang bersejarah dan tidak pernah dilupakan, selalu dikenang, selalu diperingati, karena mulai tanggal, bulan dan tahun tersebut Indonesia lahir, Indonesia bebas dari cengkeraman penjajah yang menindas, menjajah dan merampas hak azasi bangsa Indonesia waktu itu. Kemerdekaan Indonesia bukanlah semata-mata pemberian dari bangsa lain, namun kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah SWT disertai perjuangan para pejuang bangsa yang mati-matian, tak kenal lelah, pantang mundur, tak putus asa dalam mengusir penjajah. Sebagai anak bangsa kita hendaknya memahami liku-liku perjuangan para pejuang bangsa, dalam merebut kemerdekaan serta selalu menghargai jasa-jasa para pejuang yang gugur di medan perang demi Indonesia tercinta ini. Dan yang sangat penting adalah meneladani dan meneruskan perjuangan mereka dengan cara mengisi kemerdekaan melalui pembangunan disegala bidang.

Melalui tema " Kerja Kita Prestasi Bangsa " yang dicanangkan dalam peringatan HUT Kemerdekaan Ke-73 Republik Indonesia Tahun 2018 ini, marilah kita tingkatkan semangat dan etos kerja kita, semangat kebersamaan kita untuk bersatu padu, bekerja bersama dan bekerjasama mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pada saat yang sama sebagai warga Rembang mari kita wujudkan Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan SDM yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan.

Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan selamat Hari Pramuka yang diperingati pada tanggal 14 Agustus 2018 kemarin, semoga Pramuka di Kabupaten Rembang selalu eksis dalam membentuk dan membangun tunas-tunas muda yang memiliki watak, kepribadian, karakter, dan jati diri yang kokoh untuk membangun Rembang kedepan.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 28 orang

Berdasarkan pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan bahwa " Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan". Dengan demikian Rapat Paripurna ini dapat kita mulai tanpa memperhitungkan jumlah anggota Dewan yang hadir.

Dengan mengucap " ***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 10.30 WIB Rapat Paripurna Istimewa hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum kita memasuki acara pokok, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018;
3. Skorsing
4. Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya;
5. Penutup.

Selanjutnya kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok pertama dalam rapat paripurna ini, yaitu ***"Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018".***

Untuk itu, rapat paripurna saya skors.

(Ketuk palu 1 kali)

Kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, anggota Forkompinda serta rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

=====MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-73 =====

➢ *(Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018 terlampir)*

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Demikian telah kita ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018. Sehubungan dengan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya akan dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB, maka rapat kami skors sampai pukul 13.45 WIB.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Waktu skors saya cabut, dan rapat paripurna istimewa saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara pokok yang kedua yaitu **" Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang**

APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya".

Untuk keperluan tersebut, maka rapat paripurna saya skors.

(Ketuk palu 1 kali)

Kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Anggota Forkompinda dan rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

=======PENYAMPAIAN PENGANTAR/ KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2019 BESERTA NOTA KEUANGAN DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA========

- ***(Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya terlampir)***

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Demikian baru saja kita dengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Dengan telah disampaikannya Pengantar Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2019, maka selesai sudah acara rapat paripurna istimewa ini.

Sebelum saya akhiri, untuk mengenang, menumbuhkan kebanggaan dan semangat kecintaan kita kepada para pendahulu kita, marilah kita kumandangkan pekik kemerdekaan sebagai motivasi dan penggugah semangat juang kita : **.."MERDEKA" !!** *(berteriak sambil mengepalkan tangan).*

Akhirnya dengan mengucap "***Alhamdulillahirobbil'alamin***" tepat pukul 15.20 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,	SEKRETARIS,
H. GUNASIH, S.E.	**Drs. DRUPODO, M.Si.**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19670421 199303 1 009

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 73 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 DAN PENGANTAR / KETERANGAN ATAS RAPBN TAHUN 2019 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

LAMPIRAN I	:	Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
LAMPIRAN II	:	Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan HUT ke - 73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018;
LAMPIRAN III	:	Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Penyampain/ Keterangan atas RAPBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangannya.

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE - 73 TAHUN 2018 DAN MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 AGUSTUS 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	SUSTIYONO	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
	FRAKSI HARAPAN			
41	SUKARMAIN	Anggota	41	
42	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	42	
43	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	43	
44	NUR JANNAH	Anggota	44	

Keterangan :

1 I : Ijin
2 S : Sakit
3 C : Cuti
4 DL : Dinas Luar

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN RAPAT

H. GUNASIH, S.E.

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE - 73 TAHUN 2018 DAN MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 AGUSTUS 2018

PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1.
2	BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	Nur Rohim	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Zaenal Arifin, SH.MH	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	Agus Budi. S	Dandim 0720 Rembang	5.
6		Kepolisian Resort Rembang	6.
7	Mahsumi	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekertaris Daerah	8.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR OPD
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE - 73 TAHUN 2018 DAN MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 AGUSTUS 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI	[illegible]		4
5	ASISTEN I SEKDA	A. MUSLIH	[illegible]	5
6	ASISTEN II SEKDA	[illegible]		6
7	ASISTEN III SEKDA	[illegible]		7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	[illegible]	[illegible]	9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	[illegible]	[illegible]	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	[illegible]		12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	[illegible]	[illegible]	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM	[illegible]		15
16	BPPKAD	[illegible]	[illegible]	16
17	INSPEKTORAT	[illegible]		17
18	BAPPEDA	[illegible]	[illegible]	18
19	DINSOSP2KB	[illegible]	[illegible]	19
20	B K D	[illegible]	[illegible]	20
21	B P B D	PURWADI S	[illegible]	21
22	DPU TATA RUANG	SUTOHARTO	[illegible]	22
23	DPKP/ DINPERKIM	[illegible]	[illegible]	23
24	DINAS KESEHATAN	[illegible]	[illegible]	24
25	DINDIKPORA	[illegible]	[illegible]	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	[illegible]	[illegible]	26
27	DINTANPAN	[illegible]	[illegible]	27
28	DINLUTKAN	[illegible]	[illegible]	28
29	DINKOMINFO	[illegible]	[illegible]	29
30	DINAS PERHUBUNGAN	[illegible]	[illegible]	30
31	DINAS DUKCAPIL	[illegible]		31
32	DINPERMADES			32

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	[illegible]	[illegible]	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka.	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN			36
37	DINAS PMPTSP NAKER	TEGUH.G	Ka.	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP	H. WALUYO		39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY			44
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	PD BPR BKK LASEM			48
49	PT. R B S J			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			51
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB. REMBANG	AMIRUDIN	Ka. BPS	53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61
62	B P N KAB. REMBANG			62
63	KANTOR PAJAK	[illegible]	[illegible]	63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65
66	KETUA KPU KAB. REMBANG			66
67	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			67
68	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			68
69	BTPN KCP. REMBANG			69

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70	PERUM PEGADAIAN			70
71	BSM.BANK DANAMON			71
72	DHARMA WANITA PERSATUAN			72
73	GERAKAN PRAMUKA			73
74	PMI CAB. REMBANG			74
75	STIE. YPPI REMBANG			75
76	DPC PPP			76
77	DPC PARTAI DEMOKRAT			77
78	DPD PARTAI GOLKAR			78
79	DPD PAN			79
80	DPC PARTAI HANURA			80
81	DPC PKS			81
82	DPC PARTAI NASDEM			82
83	DPC PARTAI GERINDRA			83
84	DPC PKB			84
85	DPC PDI PERJUANGAN			85
86	SUARA MERDEKA			86
87	CAKRA TV			87
88	RADIO CBFM			88
89	RADIO R2B			89
90	MAJALAH BANGKIT			90
91	PATI EKSPRESS			91
92	RADIO MATA AIR			92
93	SMP N 2 REMBANG	YURHADI	GURU	93
94	SMP N 6 REMBANG	Bhm J	K s	94
95	RSUD dr. R. SOETRASNO REMBANG	SUPRIYO	Kabid. Bang Info	95
96	~~PMI REMBANG~~	~~BASIDI~~ SIDI TEGUH	~~SEKRETARIS~~	96
97	Dinbudpar	Chris Prasetyana	Kabid Destinasi Pariwisata	97
98	BKD.	MARSONO	KABID	98
99	DKR.	d Nurani H	Kesmas	99
100	[illegible]	Kabid Mi	Ka	100
101	DLH	Maryosa	Sekretaris	101
102	SMP N 1 Rembang	Sugihno	Humas	102
103	SMP N 3 Rembang	Sukantiningsih	KS	103
104	Suharto	Kabid Pora		104
105	Prasetyo	Dra. Kabid Capril		105
106	PAMUDJI	SEKRETARIS DISPERINDAG		106
107	Supriyo Utomo	Dinkes	Sekret	107

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
108	Bappeda PP	Wiyoto	Kabid	108
109	Bappeda	Drs. D	Sekda	109
110	Bappeda	Suranto	Kabid	110
111	BKD	Bambang R	Kabid	111
112	DPKP	Gayur W	Kabid	112
113	DPKP	Agus M	Kabid	113
114	DCK	SAIRONI	Kabid	114
115	SETYORINI (SMAN 2 Rbg)	SETYORINI	WKS.	115
116	Kantor.	Binbingan	Sekdin	116
117	SMA Kartini Rembang	Danang P	Guru	117
118	DISPERINDAG	MIKRI MR	Ka. Bid Pdy	118
119	— " —	ANJAR	Sek	119
120	Dinas Pora	A. Slamet	Kabid SMP	120
121	Dispora	Hesti	Sekda	121
122	Dinas Pemuda Pora	Bidang Pemuda Kabag	KABID	122
123	Dinkutha	BUDIYONO	Sekretaris	123
124	SRI SURYANINGSIH	Bappeda	Sekretaris	124
125	Bappeda	ALI SAHID	Kabid	125
126	Bappeda.	Imung Tri W	Kabid.	126
127	Binsyar Kemasan / BKD	Binsyar Kemasan	Binsyar	127
128	~~Ka. H. A.~~ Dintanpan	Ka H. A.	Kabid	128
129	Dinsyar	Ida	Kasi	129
130	Dintanpan	DESTI M	Kabid	130
131	— " —	Sri Prabandari	Kabid Dikp	131
132	"	DERI HARTINI		132
133	Inspektorat	Titik W.	INSPEKTUR	133
134	"	SRI WATINI	SEK	134
135	— " —	MUNADI	Irban III	135
136	— " —	Fery Sumarsono	Irban I	136
137	— " —	Imam TS.	Irban II	137
138	DINKES.	Anis S.	Kabid P2	138
139	Sutartik RSUD	Sutartik	~~Kabid~~ Kabid	139
140	DINSOSPPKB	PRIYADI	KABID	140
141	DPMPTSP NAKER	DEDHY N	"	141
142	DINSOS PPKB	HEGAT IKH.	Sekretaris	142
143	DINSOSPPKB	BUDI SETIASIH	Kabid PPKBM	143
144	SMPN 4 Rembang	Sugiyanti	Kepala	144
145	Dinsosppkb	TRI Kandayani	Kabid	145

	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
146	DINSOSPPKB	Dwi Martopo	Kabid Dayanan	146
147	DINAS PPKB	Nasaton Raja	Kabid	147
148	BAPPEDA	Hpdn.	Kabid	148
149	Kemenag	Y. Hariyadi	Kasi Binmas Kat	149
150	Rismarmo	BPBD	Kabid	150
151	Sulcarminingsih	BPBD		151
152	Mardana	Dinkes	Kabid	152
153	Partogo	ASN	"	153
154	Dwi	Kec Lang		154
155	HERU SUSILO / SATPOL PP		KABID	155
156	WIDODO		-"-	156
157	Teguh Sukarsono			157
158	Agus W			158
159	~~TRIJOTO~~ DPUTARU	Trijoto	Sekbi	159
160	Ir. ALI MUSTOFA	DT KME		160
161	Firman Nur C.	DT. KME		161
162	A. Fatih K	Dindikpora		162
163	Susy Chandrayani	Dinindagkop		163
164	A. Arbi	Kelk		164
165	Mulyanto	Guru Muda		165
166	Djoko P.	Dindikpora		166
167	Ai Rodiatun	BPBP R-R		167
168	Wimaryuk	Dinbudpar		168
169	Wahyu Bian	DPUTARU		169
170	[illegible]	[illegible]		170
171	[illegible]	[illegible]		171
172	NURPURNOMO MW	DINKOMINFO		172
173	SUWARNO	DINHUB		173
174	Laksmi Iwandari, dr	RS. Soetrasno		174
175	Sukasmun Kec Pamotan	Sukasmun	Kasi Trantib	175
176	Sugiyarto	Disdikbud	Kabid	176
177	[illegible]	M R		177
178	Sri Anjayani	SMPN 3 Rbg	Waka Sek	178
179	[illegible]	Dinperindag	Kordinator	179
180	Kodrun	Agus	Dal Dim	180
181	Wijayanti	Bappeda	Kabid	181
182	Wildan Alfi K	SMA Kartini		182
183	Supri Sutrisno	SMPN 1 Rembang		183

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
184	Supryanto/Kodim	Supryanto		184
185	MAYOR INF HARIYANTO	KASDIM	0720/KBO	185
186	Sofyan Chalid	Dinkes	kabid	186
187	Lasmun	Kabid Cipta	kabid	187
188	Agus Bintoro/SMP 5		Gr	188
189	Zainbang Kurniawan	Disdikpora		189
190	PPK TMSE Ujung Rig	Sukirno	ka Subag TU	190
191	Heri	Heri		191
192	Novan	"		192
193	Toki	"		193
194	Rahdyan TO	DISHUB	Kabid	194
195				195
196				196
197				197
198				198
199				199
200				200
201				201
202				202
203				203
204				204
205				205
206				206
207				207
208				208
209				209
210				210
211				211
212				212
213				213
214				214
215				215
216				216
217				217
218				218
219				219
220				220

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
221				221
222				222
223				223
224				224
225				225

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE - 73 TAHUN 2018 DAN MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 AGUSTUS 2018

PUKUL : 19.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Danramil Rembang	Kurdi	1
2	Danramil Kaliori	A. Roi — IMAM	2
3	Danramil Sumber	Sur	3
4	Danramil Sulang	SUTRISNO	4
5	Danramil Bulu		5
6	Danramil Pamotan		6
7	Danramil Gunem	B. Sutejo	7
8	Danramil Sale		8
9	Danramil Lasem	Barlan	9
10	Danramil Pancur		10
11	Danramil Sedan		11
12	Danramil Sluke	Sumijan	12
13	Danramil Kragan		13
14	Danramil Sarang		14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE - 73 TAHUN 2018 DAN MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 AGUSTUS 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Kapolsek Rembang	Haryanto	1.
2	Kapolsek Kaliori	Sulastyo	2.
3	Kapolsek Sumber		3.
4	Kapolsek Sulang	Heri B.	4.
5	Kapolsek Bulu		5.
6	Kapolsek Pamotan	M. Mabrur	6.
7	Kapolsek Gunem	Yusuf Subiyanto	7.
8	Kapolsek Sale		8.
9	Kapolsek Lasem		9.
10	Kapolsek Pancur	Dr. Diyanti, SH	10.
11	Kapolsek Sedan	Joko Purwono	11.
12	Kapolsek Sluke	Yunarwan	12.
13	Kapolsek Kragan		13.
14	Kapolsek Sarang		14.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE - 73 TAHUN 2018 DAN MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RUU APBN TAHUN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 16 AGUSTUS 2018

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	MUSTHOLIH	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOLIH	2
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG	Slamet H	4
5	CAMAT BULU	S. Haryanto	5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	Haryono	9
10	CAMAT PANCUR	Suliarto	10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE	Hartadi	12
13	CAMAT KRAGAN	M. Arief	13
14	CAMAT SARANG	MUSTAKIM	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si

NIP 19670421 199303 1 009

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE-73 TAHUN 2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono; [tidak dibacakan karena tidak hadir]

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno;

Yang saya hormati Bapak Hamzah Haz;

Yang saya hormati Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono;

Yang saya hormati Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid;

Yang saya hormati Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah;

Yang saya hormati, Para Duta Besar NegaraNegara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;

Yang saya hormati para hadirin serta Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya, kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk memperingati 73 tahun Indonesia Merdeka.

Selama 73 tahun kita sudah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh, bangsa yang tahan banting, bangsa yang ingin terus berprestasi meraih kemenangan dan kemajuan.

Pada usia yang ke-73 tahun ini, kita terus bekerja, ikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa, karena harus kita akui, ada beberapa negara lain yang mencapai kemajuan lebih cepat dibanding negara kita. Namun, kita juga harus bersyukur bahwa kita masih lebih baik dibanding banyak negara lain.

Kita bersyukur telah mampu memanfaatkan kebinekaan kita dengan ciri khas budayanya masing-masing dan dengan kearifan lokalnya masing-masing untuk menjadi sumber energi kemajuan bangsa, menjadi sumber energi yang tidak pernah habis, menjadi sumber inspirasi bagi seluruh anak bangsa, menjadi sumber kreativitas untuk memenangkan dan mengharumkan nama bangsa dan negara dalam pentas persaingan global.

Kita bersyukur memiliki Pancasila sebagai sumber energi ideologis bangsa, yang memandu seluruh anak bangsa dalam mewujudkan janji-janji kemerdekaan. Pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Dengan berpegang teguh pada Pancasila, saya yakin kita akan menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

Kita bersyukur menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sekaligus menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia. Kita telah berhasil lepas dari ketakutan terhadap ancaman instabilitas dan kekerasan politik dalam setiap regenerasi kepemimpinan nasional maupun daerah. Seratus satu pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2017 dan 171 pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2018 telah berhasil kita laksanakan dengan aman dan damai. Rakyat menyambut pesta demokrasi itu dengan kegembiraan, dengan antusiasme yang tinggi, serta kedewasaan politik yang semakin matang.

Saya yakin, dengan pengalaman yang panjang dalam berdemokrasi, Insya Allah, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak di tahun 2019 akan berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Walaupun banyak yang harus kita syukuri, namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan. Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, dan dihormati negara-negara lain di dunia.

Oleh karena itu, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Kita harus berani melakukan terobosan untuk melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat. Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan. Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena "middle income trap", tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju.

Oleh karena itu, apa yang kita lakukan kemarin dan saat ini bukanlah semata-mata untuk memecahkan masalah masa kini atau masalah satu-dua tahun ke depan. Tetapi, semua itu juga menjadi bagian dari lompatan kemajuan Indonesia untuk menjawab masalah-masalah kita di masa depan. Keberhasilan Timnas Sepakbola Indonesia U-16 menjuarai turnamen ASEAN Football Federation pada 11 Agustus 2018, adalah salah satu contohnya. Tim yang masih berusia 16 tahun ke bawah ini adalah masa depan sepakbola Indonesia, mereka adalah masa depan Indonesia.

Benih-benih harapan untuk kejayaan bangsa Indonesia dari hari ke hari semakin bersemai. Putra-putri Indonesia yang mengibarkan bendera Merah Putih di pentas dunia semakin banyak. Prestasi gemilang yang membanggakan kita semua, diraih oleh putraputri Indonesia dalam berbagai kompetisi tingkat dunia, dalam kompetisi bidang sains dan teknologi, lomba hafal Al-Quran, festival seni dan budaya, kejuaraan olah raga serta berbagai kompetisi lainnya. Kita berhasil menggaet posisi terhormat. Prestasi yang diraih anak-anak bangsa tersebut harus didukung oleh ekosistem yang kondusif sehingga bisa lebih berkontribusi untuk Indonesia maju.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Ekosistem demokrasi, ideologi Pancasila yang kokoh, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati

kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa.

Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan. Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Selain itu, Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan.

Kita juga harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Itu yang menjadi semangat Pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.

Dalam melakukan berbagai lompatan kemajuan, kita membutuhkan keberanian. Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia, termasuk ketegasan untuk melindungi hutan dan lahan kita. Upaya itu telah membuahkan hasil. Area kebakaran hutan dan lahan menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ketegasan tersebut tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada aparat TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh warga masyarakat yang dengan penuh dedikasi mencegah dan melawan ancaman kebakaran hutan.

Ketegasan juga dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Upaya ini membutuhkan kerja bersama kita semua guna menyelamatkan nyawa belasan ribu putra-putri kita, yang setiap tahunnya menjadi korban kejahatan narkoba.

Ketegasan juga harus dilakukan dalam menjaga kekayaan alam kita untuk berdaulat atas sumber daya alam kita. Kedaulatan maritim, mulai dari laut, teluk, sampai dengan samudra terus kita jaga. Kita tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan kita. Tidak sampai di situ saja. Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Selain itu, kita harus tegas untuk menjaga NKRI, meneguhkan ikrar Bhinneka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kita dukung peran ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keluarga untuk menghadang paparan ajaran radikal kepada generasi muda kita. Kita dukung sinergi Kepolisian, TNI, BIN, BNPT, dan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mencegah dan melawan terorisme.

Untuk itu, Pemerintah akan terus memastikan stabilitas keamanan, termasuk dengan alutsista yang lebih modern serta meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan TNI dan Polri. Sebagai negara yang besar, kita harus melindungi kedaulatan negara kita dengan membangun sistem pertahanan yang modern dan TNI yang profesional. Reformasi Polri terus kita lanjutkan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada Polri. Aspek kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri secara bertahap kita tingkatkan sebagai upaya mendukung kinerja TNI dan Polri.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Ekosistem yang kondusif tersebut kita manfaatkan untuk memperkokoh stabilitas makro ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan, memastikan tercapainya tujuan keadilan ekonomi, menyiapkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang, serta melakukan reformasi struktural untuk peningkatan daya saing ekonomi.

Ekonomi kita terus tumbuh di kisaran 5 persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional dalam tujuh tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya. Angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018. Untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018.

Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) kita perluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.

Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018. Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang

dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya.

Saudara-saudara Se-Bangsa dan Se-Tanah Air,

Keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti. Pemerintah merancang banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar pemerataan pendapatan bisa segera diwujudkan.

Pemerintah melakukan penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat sehingga rakyat terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga rakyat memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset, sehingga dapat mereka manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah percepatan ini membuat penerbitan sertifikat dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya. Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat.

Bersamaan dengan sertifikasi tanah, Pemerintah terus menggencarkan reforma agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare. Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan agar tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai.

Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan Pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, Pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pemerintah dalam 4 tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen, saat ini sudah diturunkan menjadi hanya 7 persen. Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas, sehingga yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh.

Bagi usaha ultra mikro dan sekaligus sebagai pemberdayaan ekonomi ummat, Pemerintah menggencarkan pembentukan lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro. Sebagai salah satu solusi yang diperlukan, untuk mendukung usaha produktif yang dilakukan ummat dan masyarakat bawah. Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Pemerintah melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa.

Terobosan lain adalah dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total alokasi-nya sudah mencapai Rp187,65 triliun. Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus

untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan. Salah satu penyangga keberlanjutan pembangunan adalah ketersediaan infrastruktur. Selama empat tahun ini, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru kita dorong terus tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM. Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya akan membuat ekonomi kita lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa.

Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal. Peradaban baru yang tidak ada pembandingnya dalam sejarah negara kita karena sama sekali belum pernah dilakukan. Sekali lagi,

pembangunan infrastruktur fisik juga sekaligus bagian dari strategi kebudayaan dalam menghadapi tantangan-tantangan kekinian dan masa depan.

Tol laut terus kita kuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatif-nya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional.

Kita terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan.

Proyek-proyek kelistrikan dengan sumber energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap di Sulawesi Selatan, akan terus kita kerjakan di seluruh pelosok Tanah Air untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan elektrifikasi, sehingga daerah-daerah perbatasan dan desa-desa terdepan kita akhirnya dapat menikmati aliran listrik setelah menunggu 73 tahun kemerdekaan.

Begitu juga saat Pemerintah membangun waduk, bendungan, dan irigasi agar petani-petani di seluruh Indonesia dapat melakukan panen lebih dari satu kali, yang akan membantu bangsa Indonesia mencapai ketahanan pangan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Di luar pembangunan infrastruktur, kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi. Jika investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi.

Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.

Berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018. Peringkat Global Competitiveness Index kita naik 5 peringkat dari posisi 41 di tahun 2016 menjadi posisi 36 di tahun 2017. Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, seperti Moody's, Fitch, dan S&P.

Kepercayaan internasional tersebut adalah momentum bagi kita untuk meningkatkan investasi dan mendorong ekspor produk-produk kita, termasuk ke negara-negara non-tradisional. Peningkatan investasi dan ekspor adalah kunci apabila kita ingin memiliki ekonomi yang tangguh.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Masa depan ekonomi Indonesia ada di tangan anak-anak muda. Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang ingin menjadi wirausahawan baru, dengan jenis-jenis usaha baru yang tidak terpikirkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mereka mendirikan berbagai start-up dengan ide-ide yang dapat mengubah dunia. Mereka mendirikan wirausaha sosial yang, dengan memiliki tujuan-tujuan mulia, memadukan keahlian berusaha dengan ketulusan hati membantu sesama manusia. Itulah yang ditunjukkan oleh para wirausahawan sosial yang mempekerjakan kelompok difabel, yang mendirikan bank sampah, yang menjaga kelestarian hayati Indonesia. Apa yang mereka lakukan telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dan harus kita dukung, harus kita bukakan jalannya.

Maka dari itu, energi serta semangat kemajuan generasi muda dan rakyat Indonesia harus terus kita dukung. Keinginan luar biasa masyarakat Indonesia untuk menjadi wirausahawan-wirausahawan baru harus diberi daya untuk tumbuh dan berkembang.

Saudara-saudaraku se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Kualitas kehidupan manusia Indonesia juga terus membaik dalam empat tahun terakhir, yang terlihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau High Human Development. Dari angka IPM kita di tahun 2014 yaitu 68,90, sudah meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017. Namun demikian, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor empat terbanyak di dunia, dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah. Kekuatan sumber daya manusia itu secara konsisten harus kita arahkan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa bersanding dengan negara-negara yang sudah maju.

Saya ingat saat datang ke Asmat, Papua, ketika menggendong dua anak Papua, saya melihat masa depan Indonesia di mata mereka. Masa depan yang harus kita lindungi dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia dapat lahir dengan sehat. Kita harus pastikan bahwa anak-anak Indonesia bebas dari stunting atau tumbuh kerdil dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Karena itu, Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten sebagai lokasi prioritas penanganan stunting secara terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga.

Kita harus pastikan anak-anak Indonesia dapat bersekolah tanpa kendala biaya melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar. Realisasi penerima manfaatnya di tahun 2017 sudah mencapai lebih dari 20 juta peserta didik usia 6 hingga 21 tahun. Dapat saya sampaikan juga bahwa harapan lama sekolah penduduk muda tahun 2017 telah mencapai hampir 13 tahun.

Kita juga fokus untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia. Jumlah Guru Garis Depan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sudah bertambah sebanyak 7.094 guru. Peningkatan kompetensi berkelanjutan juga sudah dilakukan dengan lebih dari 1 juta guru. Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut meningkat setiap tahunnya, yang terakhir di tahun 2017 menjangkau 47 juta siswa.

Namun, mengasah kepintaran dan mengasah keahlian saja tidak cukup. Manusia Indonesia harus memiliki karakter yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, agar tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, terus optimis dalam meraih cita-cita dan prestasi. Kita harus membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki akhlak mulia.

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan penghargaan yang tinggi atas peran penting lembaga- lembaga keagamaan dalam pembentukan karakter bangsa, seperti Pondok Pesantren, Dayah, Mualimin-Mualimat, Seminari, Pasraman, dan Vihara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan bagian 'soko guru' masyarakat dalam

kehidupan sosial-keagamaan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Lembaga-lembaga tersebut selama ini telah berperan penting dalam menjaga keimanan, menjaga kebinekaan, nilai kebangsaan, dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter, sehingga benteng kerukunan Indonesia semakin kokoh dalam menghadang arus intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Keberhasilan, kekuatan, dan kebersamaan itu yang harus terus kita jaga, terus kita kembangkan, agar manusia-manusia Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang memberikan mereka modal kecerdasan, modal akhlak yang mulia, untuk melangkah semakin pasti ke masa depan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Kualitas pendidikan perlu kita tingkatkan agar lebih banyak manusia Indonesia yang berdaya saing, seperti melalui program pendidikan vokasi dan sertifikasi profesi sehingga tenaga kerja kita sudah langsung siap bekerja saat lulus masa pendidikan.

Selain itu, Pemerintah mendorong agar ada kecocokan antara keahlian yang diajarkan di berbagai SMK dengan kebutuhan keahlian pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Pemerintah juga akan membuka Balai Latihan Kerja di berbagai Pondok Pesantren sebagai bagian peningkatan keahlian SDM Indonesia.

Di tingkat Pendidikan Tinggi, kita harus berani melakukan berbagai terobosan jika ingin manusia-manusia Indonesia siap berkompetisi di masa depan. Universitas-

universitas di Indonesia harus berani mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama. Harus berani memunculkan program studi baru yang mencerminkan realitas kebutuhan keahlian masa kini dan masa depan. Saya percaya, langkah-langkah terobosan Perguruan Tinggi tersebut akan disambut baik oleh generasi muda kita, generasi yang sangat ingin melakukan lompatan kemajuan.

Melalui pembangunan yang Manusia Sentris, kita akan membangkitkan elan perjuangan untuk menjadi bangsa pemenang, agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan besar, seperti tantangan Revolusi Industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia.

Kita harus bisa bicara tentang Artificial Intelligence, Internet of Things, dan berbagai kemajuan teknologi yang hampir setiap detik selalu muncul yang baru.

Indonesia harus cepat beradaptasi. Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang sedang berlomba, sedang adu kecepatan, untuk membenahi negaranya masing-masing di era digital dan perubahan peradaban manusia dewasa ini.

Dalam menghadapi dan menyikapi perubahan peradaban manusia itu, tidak bisa kita lakukan dengan pesimisme dan kekhawatiran yang berlebih. Kita justru harus optimis dan yakin bahwa modal sosial dan energi kebangsaan kita kuat untuk melompat ke depan. Lihat saja ketika empat santri muda dari Indonesia telah memenangkan kontes Robotic Games tingkat dunia di akhir tahun lalu.

Itu adalah bukti bahwa Indonesia tidak perlu takut dengan Revolusi Industri 4.0, tidak perlu khawatir terhadap masa depan. Kita justru harus memanfaatkan perkembangan yang ada untuk membawa Indonesia semakin maju. Kita harus gesit dan cepat memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata karena rumus yang berlaku sekarang bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat.

Indonesia tidak perlu gentar, jangan sampai kita tidak percaya diri, jangan kita meragukan kemampuan bangsa sendiri, karena sejatinya, kemampuan dan reputasi Indonesia sudah diakui di tingkat dunia. Salah satu buktinya, pada tanggal 8 Juni 2018, dunia memercayai Indonesia dan memilih kita menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Kepercayaan dunia ini harus kita tunaikan sebaik-baiknya.

Dunia juga sangat menghargai rekam jejak diplomasi Indonesia, terutama diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan Indonesia yang sangat menonjol. Indonesia terus menjadi jembatan dari berbagai perbedaan. Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan Trilateral Ulama IndonesiaAfghanistan-Pakistan sebagai sumbangsih Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga menjadi tuan rumah dari Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia yang membahas Wasathiyyah Islam sebagai poros utama Islam dunia dan, untuk pertama kalinya, kita juga menyelenggarakan Indonesia-Afrika Forum. Saat ini, Indonesia telah mengekspor alutsista ke Afrika dan BUMN kita telah mulai melakukan kerja sama pembangunan infrastruktur di Afrika.

Pada bulan Juni 2018, sebuah capaian penting dalam pembangunan reputasi bangsa Indonesia di mata dunia juga ditorehkan. Komisi Eropa telah mencabut larangan terbang bagi semua maskapai penerbangan di Indonesia.

Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, Indonesia turut memberikan pemikiran mengenai pentingnya peningkatan kerja sama IndoPasifik. Konsep Indonesia mengutamakan sentralitas ASEAN, mengutamakan kerja sama dan dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional.

Diplomasi Indonesia juga terus bekerja untuk Palestina. Palestina menjadi prioritas utama selama Indonesia menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terus berada di garis depan bersama dengan perjuangan bangsa Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak-haknya.

Tidak kalah penting, diplomasi Indonesia juga terus bergerak untuk melindungi Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk melalui mekanisme Safe Travel dan Smart Embassy.

Kita juga harus ingat bahwa dua hari lagi Indonesia akan mendapat kesempatan emas untuk kembali memukau dunia dengan keunggulan dan prestasi Indonesia melalui Asian Games 2018, ajang olahraga terbesar di Asia. Setelah penantian 56 tahun, tahun ini adalah kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games yang akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Asian Para Games. Di dua ajang tersebut, putra putri Indonesia akan berjuang untuk mengibarkan sang Merah Putih, bertanding untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya, berlaga untuk keharuman bangsa Indonesia.

Kita akan menjamu kontingen dari 45 negara, melibatkan lebih 11.000 atlet dan 5.500 official, terbesar sepanjang sejarah Asian Games. Sementara Asian Para Games akan menghadirkan lebih dari 5.000 anggota kontingen. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia bekerja bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games agar sukses sebagai tuan rumah dan sukses dalam prestasi.

Sebagai bangsa yang besar, sebagai salah satu mutiara terindah di Asia dan dunia, Indonesia harus menggunakan Asian Games dan Asian Para Games untuk menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah tuan rumah yang baik, bangsa yang berprestasi, bangsa juara, dan menjunjung tinggi fair play. Kita tunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi yang terdepan dalam mengangkat posisi Asia di dunia.

Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote,

Anggota Dewan yang terhormat,

Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Terakhir, dalam Sidang yang terhomat ini, saya selaku Presiden Republik Indonesia, mengajak seluruh anak bangsa agar selalu menjaga optimisme, saling berbagi, berani membuat terobosan, dan selalu mengejar prestasi secara bergotong royong.

Insya Allah, kerja-kerja besar yang kita lakukan menjadi doa bersama kita, menjadi ibadah seluruh rakyat Negeri Pancasila, menjadi prestasi bangsa, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Sabang, dari Merauke, dari Miangas, dari Pulau Rote, mari kita berbagi, mari bersama-sama kita bawa Indonesia menjadi negara maju. Kerja Kita Prestasi Bangsa.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO

Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semuanya,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Wakil presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, pada hari ini kita bisa menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya.

RAPBN tahun 2019 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Program Pembangunan Kabinet Kerja. Dalam empat tahun terakhir, kita telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, lebih merata, dan lebih berkeadilan. Fondasi yang menjadi pijakan kita bersama untuk menghadapi masa depan, menuntaskan janji kemerdekaan, menuju Indonesia maju yang berdaulat secara politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Kerja nyata selama empat tahun ini tidak selalu mudah karena lingkungan ekonomi nasional dan global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis, yang mengharuskan kita menyiapkan diri dengan baik, melakukan antisipasi secara cermat, serta membuat penyesuaian dengan cepat.

Tantangan demi tantangan kita hadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Akibatnya, saat ini kita menghadapi situasi di mana negara-negara emerging market mengalami tekanan, baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi arus modal masuk atau capital inflow. Bahkan, beberapa negara emerging market telah mengalami situasi krisis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik dalam negeri mereka.

Menghadapi tekanan eksternal seperti itu, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi kita dengan terus mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Kita juga melakukan langkah-langkah tegas dan konsisten untuk mengendalikan impor. Selain itu, kita terus memacu ekspor dan meningkatkan arus modal masuk dengan menggunakan instrumen fiskal, pemberian insentif, serta memastikan reformasi perizinan bisa berjalan dengan efektif.

Alhamdulillah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi, dari 5 persen di tahun 2014 menjadi 5,17 persen pada semester I tahun 2018. Tingkat inflasi rendah, turun dari 8,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,18 persen pada Juli tahun 2018.

Hadirin yang saya muliakan,

Kinerja ekonomi tersebut telah mampu memperbaiki indikator utama kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen. Kemiskinan turun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi satu digit 9,82 persen pada tahun 2018. Selain itu, Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan turun dari 0,406 menjadi 0,389. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 71,5 pada tahun 2018.

Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus diupayakan di tengah dinamika-dinamika yang ada. Reformasi fiskal dan struktural yang dilakukan Pemerintah telah mengembalikan Indonesia ke peringkat layak investasi dari seluruh lembaga rating internasional. Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business juga meningkat tajam, naik 48 peringkat dalam tiga tahun terakhir. Logistic Performance Index Indonesia juga naik 7 peringkat dalam periode 2014 – 2018. Capaian-capaian tersebut menjadi pemicu bagi kita semuanya untuk terus bekerja keras bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan,

Kerja keras kita bersama dalam melakukan reformasi ekonomi telah membawa kepada momentum pertumbuhan. Reformasi di bidang fiskal juga telah menghadirkan APBN yang sehat, yang adil, dan mandiri. Sehat karena APBN disusun dengan prudent, realistis, dan efektif untuk memajukan pembangunan Indonesia, serta antisipatif menghadapi tantangan-tantangan domestik dan global. Perbaikan struktural terus dipacu dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita harus terus menggiatkan investasi, ekspor, dan pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang menciptakan produktivitas, nilai tambah tinggi, dan devisa negara.

Untuk menunjang tujuan tersebut, kebijakan fiskal dan APBN tahun 2019 dirancang dengan tema "APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia". Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3 persen.

Pertumbuhan tersebut akan semakin adil dan merata, dengan mendorong semakin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal; Memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi; Menekan ketimpangan antar daerah serta memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan; Memperkuat ekonomi desa dan mengurangi kemiskinan secara lebih fokus dan lebih cepat.

Dari sisi sektoral, sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja perlu didorong lebih maju. Sektor swasta didorong untuk makin berperan sehingga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh. Untuk itu, penguatan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah perlu didorong dan dikembangkan dengan

memperkuat industri hulu hingga hilir. Iklim investasi terus diperbaiki agar efisien dan terukur, melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi.

Hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa, termasuk industri berbasis digital yang sangat bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang produktif dan inovatif.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi hanya 0,5 persen.

Dan dalam periode 2015 hingga semester I tahun 2018, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebesar Rp299,9 triliun dengan nilai realisasi subsidi bunga KUR sebesar Rp32,1 triliun dan telah dinikmati oleh 12,3 juta UMKM kita. Program dana bergulir ultra mikro untuk masyarakat di lapis terbawah telah disalurkan sebesar Rp1,1 triliun kepada 392,1 ribu usaha mikro.

Tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan bantuan kepada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan.

Tahun 2019, Pemerintah akan berupaya menjaga inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen. Tingkat inflasi yang rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pengendalian inflasi dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa, khususnya pangan, melalui peningkatan kapasitas produksi nasional dan efisiensi di sepanjang rantai pasokan.

Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Pemerintah menyadari bahwa di tahun 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar Rupiah, baik dari faktor dinamika ekonomi negara-negara maju, termasuk normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa, serta perkembangan ekonomi di Tiongkok. Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan ini tidak hanya dialami oleh

Rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang global. Nilai tukar Rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat berpengaruh terhadap kondisi keuangan di pasar domestik, termasuk pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Namun, dengan didukung oleh perbaikan kinerja perekonomian nasional dan terjaganya laju inflasi, tekanan dari ekonomi global diharapkan dapat dimitigasi.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Suku Bunga SPN 3 bulan tahun 2019 diperkirakan rata-rata 5,3 persen. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price(ICP) pada tahun 2019 diperkirakan rata-rata 70 dolar Amerika Serikat per barel. Pergerakan ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi.

Pada tahun 2019, beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP adalah geopolitik global, peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi alternatif. Lifting minyak bumi pada tahun 2019 diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi, serta rencana kegiatan produksi tahun 2019. Seluruh gambaran ekonomi makro di atas menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2019.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Di dalam RAPBN tahun 2019, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Jumlah tersebut 10 persen lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara tahun 2014, sebesar Rp1.777,2 triliun. Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil. Karena itu, belanja negara pada tahun 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin. Pada tahun 2018, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2019, Pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.

Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa. Sementara itu, program Bantuan Pangan nonTunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2019, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019. Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat. Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hadirin yang saya muliakan,

Aset paling penting dari bangsa Indonesia adalah manusianya. Karena itu, Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan-terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia Internasional.

Untuk semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amanat konstitusi, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2014, sekitar Rp353,4 triliun.

Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, Pemerintah dapat melaksanakan program aksi kebijakan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa dari jenjang pra-sekolah hingga SD, SMP, dan SMA, pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah, bahkan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi S3 bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi, terutama bagi yang kurang mampu. Anggaran Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) telah mampu menaikkan angka partisipasi murni SD, SMP, SMA, dan madrasah. Pada tahun 2019, Pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar dan 471 ribu mahasiswa melalui beasiswa bidik misi.

Selain itu, dalam periode 2014-2019, Pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok Tanah Air untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih. Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan serta rehab sekolah.

Selain itu, juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian, serta pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pondok pesantren.

Untuk memperkuat layanan kesehatan, pada tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan Rp122 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan tahun 2014 sebesar Rp59,7 triliun. Sejak tahun 2016, sesuai dengan UU Kesehatan, Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini telah memberikan hasil nyata dengan meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan dan penyebaran obat, sumber daya kesehatan di daerah, serta meningkatnya angka harapan hidup dan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang bersih.

Pada tahun 2019, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan dengan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat, di antaranya melalui penyediaan sarana prasarana yang berkualitas pada 48 rumah sakit atau balai kesehatan, serta penguatan program penurunan angka stunting yang terintegrasi di 160 Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi permasalahan gizi anak, Pemerintah juga akan mendorong pemberian makanan tambahan kepada 525.42 ibu hamil dan 1,5 juta balita kurus, serta imunisasi anak usia 0–11 bulan hingga mencapai 90 persen. Melalui berbagai program perlindungan sosial itu, diharapkan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan turun lagi ke 8,5 persen hingga 9,5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia naik ke 71,98.

Para pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Selain meningkatkan pembangunaan sumber daya manusia, Pemerintah juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran infrastruktur di tahun 2014 hanya sekitar Rp154,7 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp256,1 triliun di awal Kabinet Kerja 2015, dalam RAPBN 2019 diupayakan naik mencapai Rp420,5 triliun. Pembangunan infrastruktur ini memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, Pemerintah telah membangun jalan, pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta. Kita juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha. Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, Pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

Pada tahun 2019, kita akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah. Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi. Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta. Namun, dalam situasi global yang bergejolak, Pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, seperti melalui Mal Pelayanan Publik. Upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

Pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan, disertai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya. Untuk itu, selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada tahun 2019, dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah merencanakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasi tahun 2014 sebesar Rp573,7 triliun.

Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran Transfer Daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah yang tercermin dari membaiknya beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan Antar-Daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668, persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan meningkat dari 87,1 persen menjadi 93,3 persen, serta akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak meningkat dari 61,1 persen menjadi 67,9 persen.

Selain itu, melalui pelaksanaan Dana Desa yang mulai dialokasikan sejak tahun 2015, berbagai sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat telah berhasil dibangun. Realisasi anggaran Dana Desa sebesar Rp127,2 triliun dalam periode 2015-2017 telah dimanfaatkan, antara lain untuk pembangunan sekitar 124 ribu kilometer jalan desa, 791 kilometer jembatan, akses air bersih 38,3 ribu unit, sekitar 3 ribu unit tambatan perahu, 18,2 ribu unit PAUD, 5,4 ribu unit Polindes, 6,6 ribu unit pasar desa, 28,8 ribu unit irigasi, 11,6 ribu unit Posyandu, dan sekitar 2 ribu unit embung.

Pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan pengalokasian Dana Desa untuk lebih berpihak pada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang mempunyai penduduk miskin yang tinggi. Pemanfaatan Dana Desa juga diarahkan untuk skema padat karya tunai guna memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya, hingga Semester I Tahun Anggaran 2018, realisasi Dana Desa telah mencapai Rp35,9 triliun atau 59,8 persen dari pagunya. Realisasi dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun 5,3 ribu kilometer jalan desa, 24,1 kilometer jembatan, 6 ribu unit akses air bersih, 508 unit tambatan perahu, 1,6 ribu unit PAUD, 910 unit Polindes, 845 unit pasar desa, 10,8 ribu unit irigasi, 677 unit posyandu, dan 664 unit embung. Dengan pencapaian itu, serta evaluasi perbaikan yang terus dilakukan, Pemerintah berkeyakinan, dengan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp832,3 triliun pada tahun 2019 akan memperkuat pemerataan pembangunan di 34 provinsi, 508 kabupaten/kota, hingga 74.957 desa.

Selain melalui belanja prioritas tersebut, di tahun 2019, Pemerintah juga memberikan dukungan alokasi anggaran yang mencukupi untuk terselenggaranya pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden, yang dilakukan secara serentak untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Alokasi anggaran yang signifikan juga ditujukan untuk bidang pertahanan dan keamanan, guna menjaga kelancaran pesta demokrasi, keamanan pelaksanaan program pembangunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berbagai belanja tersebut di atas, APBN disusun secara adil, di mana dari setiap rupiah yang dikumpulkan dari masyarakat, didistribusikan kembali untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa di seluruh pelosok Nusantara.

Para pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Kemandirian APBN diwujudkan dengan semakin mengutamakan dan mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Prinsip kemandirian APBN tersebut ditunjukkan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara.

Pada tahun 2014, sumbangan penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai 74 persen atau Rp1.146,9 triliun, dan di tahun 2018 ini diperkirakan mencapai 81 persen atau Rp1.548,5 triliun. Semakin tingginya peranan pajak dalam mendanai APBN tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan, melalui kebijakan, strategi perpajakan, dan implementasi reformasi pajak yang berkelanjutan, serta didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam kerangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan, kita bersyukur karena pada tahun 2016 dan 2017, Indonesia telah berhasil melaksanakan program tax amnesty yang menjadi awal dari era baru kepatuhan perpajakan di Indonesia. Di samping menggali sumber-sumber penerimaan, Pemerintah juga akan terus menjaga iklim investasi dan kemajuan dunia usaha domestik dengan kebijakan

insentif perpajakan. Pemerintah juga telah mengeluarkan pengaturan pajak khusus sebagai insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta melakukan perluasan basis pajak sebagai kelanjutan hasil Tax Amnesty melalui Automatic Exchange of Information (AEoI).

Ke depan, kebijakan perpajakan diharapkan juga lebih akomodatif menghadapi tren ekonomi digital dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung administrasi perpajakan. Pada tahun 2019, kita secara konsisten tetap berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara realistis dan berkeadilan, menjaga iklim investasi, melakukan konservasi lingkungan, dan melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan sebesar Rp2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6 persen dari perkiraannya tahun 2018, bahkan naik 38,2 persen dari Pendapatan dan Hibah di tahun 2014, sebesar Rp1.550,5 triliun.

Dari sisi perpajakan, arah kebijakan tahun 2019 dilakukan dengan mengumpulkan sumber pendapatan negara dari kegiatan ekonomi nasional, serta terus mendorong peningkatan kepatuhan melalui reformasi administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Dengan kebijakan itu, melihat perkembangan positif penerimaan perpajakan, didukung momentum pertumbuhan ekonomi, diharapkan tax ratio tahun 2019 dapat mencapai 12,1 persen terhadap PDB, naik dari perkiraan di tahun 2018 sebesar 11,6 persen.

Pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan melalui berbagai instrumen, yaitu: Insentif perpajakan sektoral untuk mendukung sektor prioritas, antara lain melalui kebijakan tax holiday, tax allowance, fasilitas pembebasan Bea Masuk, dan subsidi pajak; Insentif perpajakan Kawasan, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan industri, dan tempat penimbunan berikat; Insentif perpajakan khusus untuk mendorong ekspor, antara lain melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, penugasan khusus ekspor, dan tempat penimbunan berikat.

Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan vokasi dan litbang, Pemerintah juga akan memberikan insentif perpajakan khusus berupa fasilitas pengurangan pajak. Sementara itu, kebijakan PNBP tahun 2019 esensinya diarahkan untuk optimalisasi penerimaan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset, dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan publik dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam melakukan optimalisasi PNBP Sumber Daya Alam,

Pemerintah terus memperbaiki tata kelola dan transparansi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta menjaga pengelolaan dan keberlanjutan kelestarian alam. Dengan telah direvisinya UU PNBP, diharapkan pengelolaan PNBP akan lebih baik dan optimal, dengan tetap mempertimbangkan keadilan masyarakat, serta kesinambungan pengelolaan sumber daya alam ke depan.

Hadirin yang saya muliakan,

Pembiayaan APBN tahun 2019 akan dilaksanakan secara akuntabel. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan utang lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya, serta mengarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah. Pada tahun 2019, Pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan. Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi 2,12 persen tahun 2018 dan pada tahun 2019 akan diturunkan untuk defisit APBNnya menjadi 1,84 persen.

Arah kebijakan APBN yang terkendali membuktikan bahwa Pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati-hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata. Perbaikan kebijakan fiskal juga ditunjukkan dengan defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp64,8 triliun pada tahun 2018, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp21,7 triliun pada tahun 2019.

Dengan arah kebijakan fiskal itu, diharapkan kita akan dapat mencapai kondisi keseimbangan primer yang seimbang atau surplus dalam waktu dekat. Selain penurunan defisit anggaran, untuk mengendalikan tambahan utang, Pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen. Langkah pengendalian ini konsisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kita masih mengalami kenaikan pembiayaan akibat ekspansi fiskal untuk stabilisasi dan memperkecil dampak merosotnya harga komoditas waktu itu. Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang

semakin kecil, dengan peningkatan pendapatan yang realistis, dengan belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, maka APBN diharapkan akan semakin sehat, adil, dan mandiri.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya muliakan,

Demikianlah Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangannya. Besar harapan kami untuk segala dukungan, masukan, dan kerja sama seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan RAPBN tahun 2019. Kita harus sadari bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus kita jaga bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun untuk generasi masa depan.

Sebagai penutup, perkenankanlah kami menyampaikan bahwa kebijakan serta pengelolaan ekonomi tidaklah berada di ruang vakum. Kondisi sosial politik yang dinamis dan harmonis memberi kontribusi positif bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif dan optimal sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, besar harapan kami, DPR RI terus mendukung Pemerintah, terus bekerja sama, bergotong royong demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

Ingat, Kerja Kita Prestasi Bangsa!

Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!

Terima kasih,

Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya

Jakarta, 16 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO